

**KAJIAN KARAKTERISTIK BERLOKASI PEDAGANG KAKI LIMA  
DI KAWASAN PENDIDIKAN TEMBALANG KOTA SEMARANG**

**TUGAS AKHIR**

Oleh:

**DIAN HERYANI  
L2D 002 393**



**JURUSAN PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA  
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS DIPONEGORO  
SEMARANG  
2006**

## ABSTRAK

Kota merupakan akumulasi dari berbagai kepentingan, konflik maupun ketidakpastian akan selalu timbul, termasuk permasalahan sektor informal kota, terutama PKL. Saat ini, terutama di Kota Semarang, PKL mulai berkembang pesat di kawasan-kawasan fungsional, dalam hal ini adalah kawasan pendidikan. Permasalahan PKL ini pada dasarnya muncul akibat tidak adanya acuan yang jelas dan tepat dalam penentuan lokasi PKL. Hal inilah yang terjadi di kawasan pendidikan Tembalang sebagai wilayah studi, penetapan lahan lokasi PKL dilakukan hanya berdasarkan karena sudah banyaknya PKL yang berada di lokasi tersebut, seperti pada Jl. Prof. Sudharto, Jl. Sirojudin, Jl. Banjarsari. Padahal, perkembangan saat ini PKL juga berkembang di lokasi ruas jalan yang lain. Penentuan lokasi PKL yang tidak memperhatikan karakteristik berlokasi PKL inilah, pada akhirnya akan menimbulkan berbagai permasalahan di lokasi terkait.

Pada dasarnya, tujuan dari studi ini yaitu untuk menemukenali karakteristik berlokasi pedagang kaki lima pada kawasan pendidikan Tembalang, sesuai dengan karakteristik aktivitasnya. Untuk mencapai tujuan yang diharapkan, maka sasaran yang harus dicapai yaitu identifikasi profil PKL, ruang dan aktivitas PKL pada kawasan pendidikan Tembalang, serta identifikasi profil dan persepsi pengunjung terhadap keberadaan PKL di kawasan pendidikan Tembalang. Setelah itu dilakukan analisis karakteristik berlokasi PKL pada kawasan pendidikan Tembalang, untuk mengetahui sebab akibat akhirnya PKL memilih lokasi terkait untuk menggelar dagangannya. Dengan demikian, diperoleh rumusan karakteristik berlokasi PKL di kawasan pendidikan Tembalang.

Dengan menggunakan teori dan alat analisis yang sudah ada, maka pendekatan yang sesuai untuk digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif. Selain itu, pendekatan kuantitatif ini juga digunakan untuk menjelaskan hubungan antar variabel, dalam hal ini adalah sebab akibat PKL memilih berjualan lokasi-lokasi di kawasan Tembalang berdasarkan pada persepsi PKL dan pengunjung PKL. Teknik analisis yang digunakan yaitu tabulasi silang, distribusi frekuensi, dan deskriptif dengan komparatif teori. Pengumpulan data yang dibutuhkan adalah data primer dan sekunder, terutama melalui kuesioner. Adapun, penentuan sampel kuesioner dalam penelitian ini, dibagi dua, yaitu untuk PKL dan pengunjung PKL. Sampel PKL menggunakan stratified random sampling berdasarkan jenis dagangan PKL pada tiap ruas jalan lokasi PKL. Sedangkan, penentuan sampel pengunjung PKL adalah random sampling. Karena adanya keterbatasan informasi mengenai identitas populasi pengunjung PKL, maka responden nantinya merupakan pengunjung PKL yang ditemui saat survey nanti.

Kesimpulan yang diambil dari studi ini, yaitu PKL merupakan salah satu lapangan pekerjaan utama yang mudah ditembus oleh masyarakat sekitar Tembalang maupun, di luar kawasan Tembalang. Pengunjung yang mayoritas merupakan mahasiswa (anak kos), keberadaan PKL di kawasan pendidikan Tembalang sangat dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari. Secara makro, karakteristik berlokasi PKL di kawasan pendidikan Tembalang adalah lokasi yang strategis dekat dengan kampus maupun kompleks kos-kosan yang ramai oleh aktivitas mahasiswa. Kemudahan akses ke lokasi PKL Tembalang didukung ketersediaan angkutan umum yang masuk ke kawasan. Selain itu, kegiatan utama kawasan Tembalang, yaitu pendidikan dan aktivitas ikutannya seperti perdagangan, perumahan/kos-kosan menyebabkan akumulasi tingkat kunjungan yang tinggi ke lokasi. Dari segi kenyamanan, aspek luasan ruang untuk tempat usaha yang cukup untuk mengatur sarana dagang dengan mudah dan suasana yang mendukung dengan adanya aktivitas yang kompleks menyedot banyak orang untuk berkunjung, juga mendukung PKL untuk menjajakan dagangannya di lokasi kawasan Tembalang ini.

Secara mikro, diperoleh spot-spot lokasi PKL di dalam kawasan Tembalang berdasarkan pada karakteristik berlokasi PKL di kawasan pendidikan Tembalang, yaitu Jl. Prof. Sudharto, yang merupakan jalan utama masuk kawasan pendidikan Tembalang dan dekat dengan jalan arteri Semarang-Solo, sehingga tingkat kunjungan lebih tinggi. Karakteristik berlokasi PKL di Jl. Jatimulyo lebih karena banyak fasilitas pendidikan dan kos-kosan. Adapun, PKL yang berlokasi di Jl. Tirtoagung, Jl. Sirojudin, dan Jl. Banjarsari memiliki alasan berlokasi yang sama, yaitu merupakan pusat kos-kosan/perumahan yang ramai oleh lalu lalang aktivitas mahasiswa dari kos ke kampus atau ke aktivitas yang lain sepanjang hari.

### **Keywords :**

Karakteristik berlokasi, aktivitas pedagang kaki lima dan kawasan fungsional pendidikan

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Salah satu faktor terbentuknya kota, adalah adanya keterpusatan penduduk dengan aktivitasnya (Kostof, 1991:37). Kota itu sendiri bersifat dinamis dan akan terus berkembang seiring dengan berjalannya waktu. Hal ini dikarenakan kota merupakan sebuah sistem yang didalamnya terdapat masyarakat dengan aktivitas dan perilakunya. Faktor penyebab perkembangan kota ini, antara lain penambahan penduduk dan perubahan aktivitasnya (Sujarto, 1998: 122). Dengan segala keterbatasan yang ada, baik dari segi sumber daya, sarana prasarana yang ada, maupun aspek koordinasi manajemen, keadaan ini kemudian berkembang menjadi suatu permasalahan kota yang perlu dipecahkan. Berkembangnya sebuah kota adalah hal yang alamiah, bukan sesuatu yang harus dicegah. Akan tetapi, perlu arahan agar perkembangan tersebut dapat terkendali.

Kriteria dasar yang digunakan untuk mengupayakan pemecahan dan minimalisasi masalah perkotaan ini, diantaranya adalah pengembangan perencanaan kota berdasarkan keseimbangan dan keserasian kehidupan kota (Sujarto, 1998: 130). Mengingat pola sosial budaya, ekonomi, dan lingkungan fisik kota yang beragam, termasuk kondisi kota yang serba dualistik. Kondisi dualistik (perbedaan keadaan) di perkotaan ini ditunjukkan pada berbagai hal, seperti miskin dan kaya, modern dan tradisional, serta sektor formal dan informal. Oleh karena kota merupakan akumulasi dari berbagai kepentingan itulah, konflik maupun ketidakpastian akan selalu timbul, termasuk permasalahan sektor informal kota.

Menurut Dipak Mazumdar, di dalam sektor informal yang terlibat lebih banyak adalah kaum migran, yang bermula dari proses migrasi penduduk ke kota (Manning, 1985: 114). Sektor informal ini lebih berorientasi pada kesempatan kerja daripada keuntungan. Pendekatan yang dilakukan pada sektor informal ini haruslah berbeda. Tidak bisa dikatakan lagi bahwa sektor informal cuma bersifat sementara sebagai penampungan orang-orang yang tidak bisa masuk ke sektor formal. Akan tetapi, keberadaannya justru menjadi motor pertumbuhan aktivitas ekonomi. Sektor informal ini identik dengan sifat yang tidak legal, sehingga kebijakan-kebijakan umum pemerintah di Indonesia terhadap sektor informal cenderung memusuhi dan dianggap sebagai penyebab masalah yang timbul di kota.

Permasalahan yang sering muncul dari kegiatan informal kota adalah di sektor perdagangan, yaitu kegiatan pedagang kaki lima (PKL). Keberadaan mereka sangat mudah dijumpai di kota, seperti pada lokasi alun-alun kota maupun di dekat pusat keramaian kota yang umumnya berjualan di trotoar-trotoar, dan pinggir-pinggir toko (Yustika, 2000: 175). Hal ini berarti

pula, bahwa untuk melakukan aktivitasnya mereka menggunakan atau bisa dikatakan "menempel" pada ruang-ruang publik dan bahkan ruang privat lainnya, seperti yang dikemukakan oleh Manning dan Noor Effendi (1985: 348). Sebenarnya keberadaan PKL dapat mendukung kegiatan formal di lokasi tersebut, tetapi kenyataan yang ada justru cenderung termarginalkan baik dari segi lokasi dan ruang, maupun regulasi/hukum pengaturannya.

Fenomena sektor informal pedagang kaki lima ini pada dasarnya merupakan bentuk pengkondisian dari pembangunan yang tidak memadai kapasitasnya, baik dari strategi dan kebijakan yang diterapkan maupun perlakuan pemerintah sendiri yang tidak sungguh-sungguh memperhatikan sektor ini (Rachbini, 1994: 81). Sampai dengan saat ini, penanganan masalah sektor informal pedagang kaki lima di perkotaan masih belum berubah dari pola lama, yaitu penggusuran demi kebersihan, keamanan, dan kenyamanan kota. Beberapa regulasi mengenai pedagang kaki lima dapat dikatakan belum aspiratif karena masih berupa penggusuran-penggusuran. Seperti yang terjadi di Pasar Sunggingan Boyolali, para PKL di sekitar lokasi tersebut digusur karena alasan kebersihan dan penertiban dalam rangka menyongsong lomba Adipura 2006. Parahnya lagi, ternyata dari pihak Pemkot tidak mempunyai rencana lokasi baru untuk relokasi PKL tersebut. Hal inilah, yang kemudian menimbulkan protes dari pedagang kaki lima tersebut karena merasa diperlakukan tidak adil (Kedaulatan Rakyat, 17 Februari 2006).

Beberapa kebijakan seperti yang telah dikemukakan diatas, memang telah dikeluarkan untuk menertibkan pedagang kaki lima ini, termasuk pengaturan jadwal waktu berdagang sampai dengan upaya relokasi PKL ke tempat lain. Khusus untuk yang disebut terakhir ini, yang paling sering menimbulkan konflik antara aparat pemerintah dengan para pedagang. Contoh kasus, adalah pedagang kaki lima di Jalan Menur, Surabaya, Jawa Timur, digusur paksa oleh tim gabungan dari Satuan Polisi Pamong Praja dan Garnisun setempat. Mereka digusur paksa karena berjualan di areal larangan berdagang. Para PKL ini sempat menolak penggusuran. Namun, mereka akhirnya menyerah dan membongkar sendiri lapak jualannya karena jumlah petugas yang banyak. Anehnya, para PKL ini kembali menggelar dagangannya setelah petugas meninggalkan lokasi. ([www.metrotvnews.com](http://www.metrotvnews.com), diakses 6 Juni 2006). Hal ini karena lokasi PKL baru yang disediakan kurang strategis dan potensial untuk PKL, praktis para PKL tersebut lebih cenderung kembali ke lokasi semula. Akhirnya, yang terjadi disini adalah seperti 'kucing-kucingan' antara PKL dengan aparat.

Semakin metropolitan sebuah kota, semakin menjamur pula PKL yang tumbuh. Seperti yang terjadi di kota-kota di Indonesia, sama halnya dengan di Semarang ibukota propinsi Jawa Tengah, aktivitas PKL juga semakin menjamur. Pada umumnya, PKL di Kota Semarang tumbuh pesat di setiap kawasan-kawasan fungsional perkotaan, termasuk di sekitar kawasan pendidikan.

Kawasan pendidikan, terutama pendidikan tinggi merupakan salah satu aktivitas yang dapat menjadi motor penggerak perkembangan kawasan.

Hal semacam itulah yang terjadi di salah satu kawasan pendidikan di Kota Semarang. Dengan studi kasus di kawasan pendidikan Tembalang yang berlokasi di pinggiran selatan Kota Semarang, kawasan pendidikan Tembalang ini memang diarahkan menjadi kawasan pusat pendidikan tinggi wilayah Jawa Tengah, sesuai dengan RTRW Kota Semarang 2000-2010, yang terdapat beberapa kampus dan akademi di dalam dan sekitar kawasan. Pembangunan sarana pendidikan tinggi pertama kali di kawasan Tembalang ini adalah kampus Politeknik Negeri Semarang. Namun, dapat dikatakan bahwa perkembangan kawasan mulai terjadi dengan cepat sejak adanya pembangunan kampus Universitas Diponegoro. Diawali dengan pembangunan dan ditempatinya kampus Jurusan Teknik Sipil pada sekitar tahun 1993, kemudian secara serentak disusul dengan pembangunan kampus teknik yang lain seperti (Teknik Arsitektur, Kimia, Elektro, Mesin, Planologi), serta kampus MIPA dan Peternakan. Tahun 1997, kampus-kampus ini mulai digunakan untuk kegiatan pendidikan, kawasan Tembalang dan sekitarnya mulai berkembang.

Pengembangan kawasan pendidikan seperti yang telah diuraikan diatas, mendorong daerah selatan Kota Semarang ini menjadi daerah yang cepat berkembang (*fast growing area*). Adanya kawasan pendidikan ini memberikan beberapa efek ganda terhadap perubahan aktivitas yang beragam pada daerah sekitarnya, misalnya pembangunan perumahan di sekitar yang semakin banyak, meningkatnya aktivitas perdagangan dan jasa. Selain itu, tingkat kunjungan orang ke lokasi ini (Tembalang dan sekitarnya) semakin bertambah, ditandai dengan tingginya arus mahasiswa yang masuk ke kawasan Tembalang. Oleh sebab itu pula, kemungkinan terjadinya dualistik aktivitas kota dalam kawasan ini sangat tinggi, yaitu selain di sektor formal, yang paling signifikan adalah pada sektor informal (misalnya, penyediaan jasa sewa kamar/kos-kosan, fotokopi, rental komputer, warung-warung makan, serta pedagang kaki lima). Pada kurun waktu inilah, perkembangan pedagang kaki lima di kawasan pendidikan Tembalang meningkat pesat, mereka berlokasi di dekat pusat-pusat aktivitas penduduk.

Pertama kali, PKL mulai tumbuh yaitu di sepanjang Jl. Prof. Sudharto sampai dengan pertigaan Jl. Sirojudin. Sekitar tahun 2002, pihak UNDIP mengambil kebijakan untuk menggusur beberapa PKL yang berjualan di Jl. Prof. Sudharto, karena jumlah PKL yang semakin bertambah dan mendekati lingkungan kampus, serta mulai memakai lahan milik UNDIP. Meskipun demikian, mereka tetap berjualan di jalan-jalan di luar lahan milik UNDIP. Akhirnya, sampai saat ini PKL di kawasan Tembalang tetap berkembang dan semakin meningkat dengan lokasi yang meluas sampai ke Jl. Sirojudin, Jl. Banjarsari, Jl. Jatimulyo dan Jl. Tirtoagung (Wawancara Kasie. Trantib Kelurahan Tembalang, 5 Juni 2006).